



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2018**

**BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusak kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Brebes, Maret 2019



BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI, SE, MH.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2012 – 2017 dengan RPJMD 2017 – 2022, dalam hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada dari RPJMD 2012 – 2017. Sehingga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2012 – 2017, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Brebes tersebut, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

❖ Misi I

Misi I terdapat 1 sasaran dan 4 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 101,61% kategori sangat berhasil.

❖ Misi II

Misi II terdapat 2 sasaran dan 7 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 123,35% kategori sangat berhasil.

❖ Misi III

Misi III terdapat 4 sasaran dan 9 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 93,31% kategori berhasil.

❖ Misi IV

Misi IV terdapat 2 sasaran dan 8 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 102,29% kategori sangat berhasil.

❖ Misi V

Misi V terdapat 2 sasaran dan 4 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 91,04% kategori berhasil.

❖ Misi VI

Misi VI terdapat 1 sasaran dan 4 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 100,59% kategori sangat berhasil.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 Sasaran yang mencakup 36 indikator sasaran, diketahui bahwa tercapai nilai 122,44 % dengan kategori **sangat berhasil**.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2018 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Brebes , 29 Maret 2019

Inspektur Kabupaten Brebes



Drs. SRI TEGUH PAMBUDI, MSi.
Pemula Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 020

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan		Check List
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi disetiap unit kerja	✓
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III.	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓

No.	Pernyataan	Check List
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
	4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan / sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
	10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART	✓

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan luas 1.662,96 km² atau 5,10% dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang 65,48 km dan luas wilayah 12 mil laut 1.178,19 km². Sebagai kabupaten yang berada diwilayah pantura, Kabupaten Brebes sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah dari arah barat pantura.

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak antara 6°44'-7°21' Lintang Selatan dan antara 108° 41' - 109° 11' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km.

Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:

- Sisi Utara : Laut Jawa
- Sisi Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Sisi Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- Sisi Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat)

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Brebes



Secara administratif Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan dan dibagi lagi menjadi 292 desa dan 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT. Jarak dari ibukota kabupaten ke kecamatan terjauh adalah Kecamatan Salem dan terdekat Kecamatan Brebes.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes memiliki topografi yang sama, yaitu 5 kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 kecamatan dataran rendah dan 3 kecamatan dataran tinggi atau pegunungan. Dengan topografi wilayah yang bervariasi, beberapa wilayah di Kabupaten Brebes termasuk dalam kawasan rawan bencana.

Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1.
Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km ²)	(%)
1	Salem	21	-	152,09	9,16
2	Bantarkawung	18	-	205,00	12,33
3	Bumiayu	15	-	73,69	4,43
4	Paguyangan	12	-	104,94	6,31
5	Sirampog	13	-	67,03	4,03
6	Tonjong	14	-	81,26	4,89
7	Larangan	11	-	164,68	9,90
8	Ketanggungan	21	-	149,07	8,96
9	Banjarharjo	25	-	140,26	8,43
10	Losari	22	-	89,43	5,38
11	Tanjung	18	-	67,74	4,07
12	Kersana	13	-	25,23	1,52
13	Bulakamba	19	-	102,93	6,19
14	Wanasari	20	-	74,44	4,48
15	Songgom	10	-	49,03	2,95
16	Jatibarang	22	-	35,18	2,16
17	Brebes	18	5	80,96	4,87
Jumlah		292	5	1.662,96	100

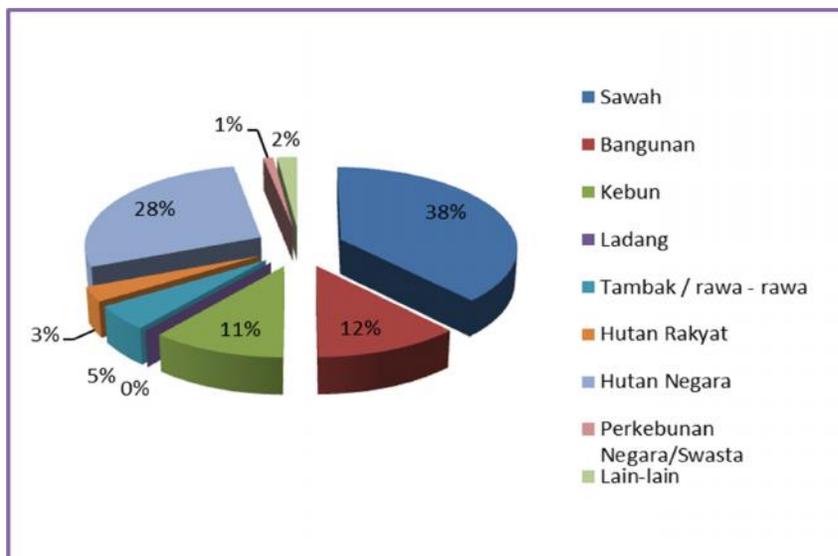
Sumber : Brebes Dalam Angka 2018

Topografi Wilayah Kabupaten Brebes bervariasi dari laut hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0 - > 2.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Wilayah dengan ketinggian kurang dari 25 meter dpl menyebar diseluruh Kabupaten Brebes kecuali Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong. Luasan wilayah di 6 Kecamatan tersebut adalah 65.549 ha dimana terdapat wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dpl seluas 1.049 ha yaitu di Kecamatan Sirampog.

Lahan di wilayah Kabupaten Brebes sebagian besar untuk lahan persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Brebes, luas lahan persawahan relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu mencapai 63,703 ha atau 37,7 % dari total wilayah Kabupaten Brebes. Sisanya 62,3% atau sebesar 103.593 ha adalah untuk perkebunan, pemukiman, industri, hutan rakyat/negara, tambak, kolam, rawa-rawa dan lain-lain.

Grafik 1.1.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes



2. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Brebes menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Brebes menurut data SIAK awal semester 2 Tahun 2018 mencapai 1.904.751 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Masing-masing jumlahnya adalah 976.129 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 51,25% dan 928.622 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 48,75%.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes bila di lihat per Kecamatan sangat bervariasi, distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata. Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Brebes 178.376 jiwa (9,36%), Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 61.975 jiwa atau (3,25%).

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Brebes
menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Semester 1 Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Luas* Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Salem	31.650	30.325	61.975	104,37	152,09	407
Bantarkawung	51.012	48.254	99.266	105,72	205,00	484
Bumiayu	56.505	53.482	109.987	105,65	73,69	1.493
Paguyangan	55.572	52.461	108.033	105,93	104,94	1.029
Sirampog	34.625	32.593	67.218	106,23	67,03	1.003
Tonjong	38.556	36.619	75.175	105,29	81,26	925
Jatibarang	44.136	42.447	86.583	103,98	164,68	2.461
Wanasari	79.793	75.036	154.829	106,34	149,07	2.080
Brebes	90.698	87.678	178.376	103,44	140,26	2.203
Songgom	40.930	38.700	79.630	105,76	89,43	1.624
Kersana	32.555	31.489	64.044	103,39	67,74	2.538
Losari	66.503	63.229	129.732	105,18	25,23	1.451
Tanjung	50.527	48.433	98.960	104,32	102,93	1.461
Bulakamba	90.729	85.495	176.224	106,12	74,44	1.712
Larangan	77.151	73.514	150.665	104,95	49,03	915
Ketanggungan	70.835	66.802	137.637	106,04	35,18	923
Banjarharjo	64.352	62.065	126.417	103,68	80,96	901
Jumlah	976.129	928.622	1.904.751	105,12	1.662,96	1.145,40

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, 2018

Selain itu, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.145 jiwa/km² yang artinya disetiap 1 km² didiami oleh sekitar 1.145 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan paling tinggi ada di Kecamatan Kersana, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem.

3. Kondisi Pendidikan

Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbang pada kualitas penduduk yang semakin baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan sejak tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Data tentang perkembangan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes
Tahun 2016 – 2018

Tingkat Pendidikan	2016		2017		2018	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK/RA/ABA	3	521	3	521	3	583
SD	872	18	872	21	870	26
MI	7	203	7	203	7	207
SDLB	1	-	1	1	1	1
SMP	81	61	81	65	81	73
MTs	4	93	4	93	4	95
SMA	17	15	17	14	17	14
SMK	6	85	6	83	6	88
MA	2	26	2	26	2	28
PT/Akademi	-	6	-	6	-	6

Sumber data : Dinas Pendidikan 2018

Rasio jumlah guru terhadap murid pada Tahun 2018 di Kabupaten Brebes adalah pada Jenjang TK : 1 guru berbanding 18 siswa, SD : 1 guru berbanding 21 siswa, SMP : 1 guru berbanding 15 siswa, MTs : 1 guru berbanding 16 siswa, SMA : 1 guru berbanding 16 siswa, MA : 1 guru berbanding 14 siswa dan SMK : 1 guru berbanding 15 siswa.

Minat belajar masyarakat Kabupaten Brebes di Tahun 2017 semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung Dinas Pendidikan akan tetapi seluruh komponen pemerintahan.

4. Kondisi Kesehatan

Pelayanan kesehatan berperan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah, semakin baik pelayanan kesehatan dan keterjangkauan masyarakat dalam menikmati sarana kesehatan yang disediakan secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan mutu SDM di suatu daerah. Derajat kesehatan masyarakat dapat dinilai dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang tersedia, akses masyarakat dalam menikmati semua fasilitas kesehatan disuatu daerah serta sistem pelayanan kesehatan yang baik.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan rujukan. Disamping pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, partisipasi sektor swasta juga semakin meningkat terutama dalam pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Induk, Pustu, PKD, Balai pengobatan swasta, RS khusus, Rumah Bersalin, RSUD Pemerintah dan RSUD Swasta. Selengkapnya jumlah fasilitas kesehatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	2
2.	Rumah Sakit Umum Swasta	9
3.	RSIA	2
4.	Puskesmas Induk	38
5.	Puskesmas Pembantu	60
6.	Klinik / Praktek Dokter	70
7.	Puskesmas Keliling	56
8.	Poliklinik	22
9.	Polindes	236
10.	Posyandu	1.789

Sumber data :SIPD Kabupaten Brebes Tahun 2018

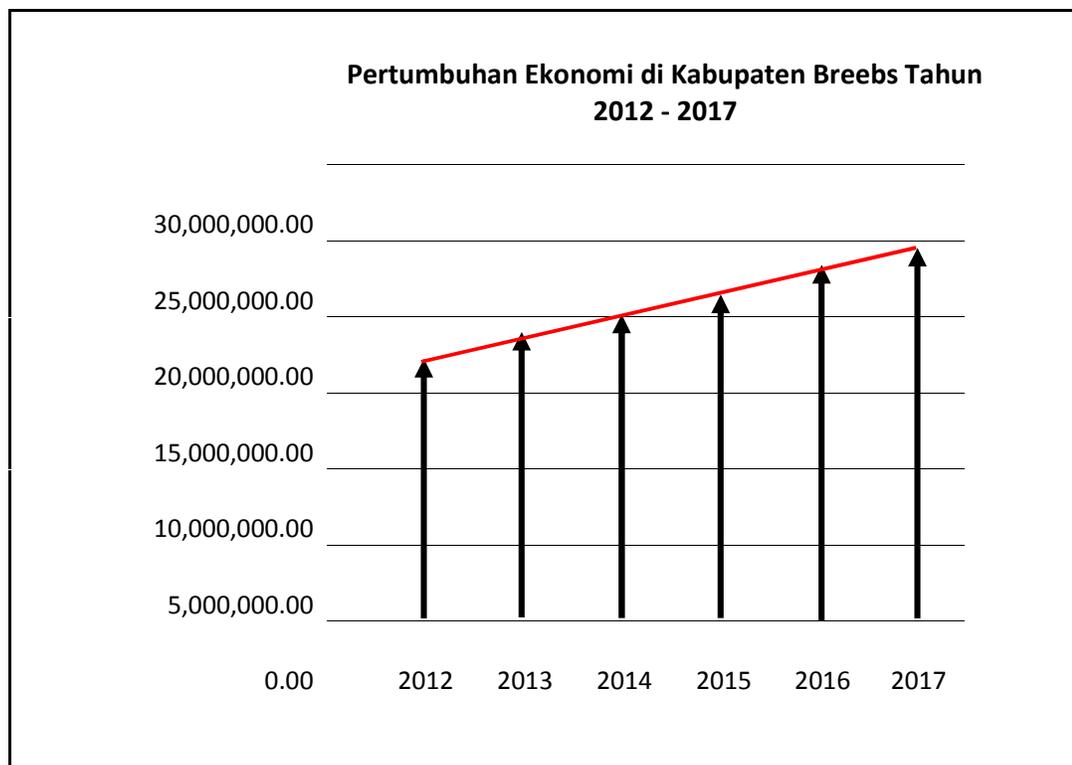
5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRD dibagi menjadi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar

Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional Kabupaten Brebes menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambahan) pada suatu waktu tertentu. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Brebes masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Brebes mencapai Rp. 34.340.820,52 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 27.867.371,33. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2016 :

Grafik 1.2

Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes Tahun 2017



Sumber: data BDA Tahun 2018

Tabel 1.5

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 – 2017 (Jutaan Rupiah).

NO.	URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.775.202,69	14.113.780,26	15.128.930,56	15.399.243,06
2.	Pertambangan dan Penggalan	654.267,75	792.514,6	855.105,39	948.550,12

NO.	URAIAN	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
3.	Industri Pengolahan	4.296.143,62	5.022.197,10	5.573.059,29	6.227.725,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	15.741,45	18.613,40	20.699,49	23.591,99
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	18.768,11	19.843,78	20.715,84	21.619,93
6.	Konstruksi	1.257.523,52	1.506.916,92	1.515.614,18	1.665.329,16
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	5.097.031,91	5.513.985,76	5.986.182,68	6.579.288,38
8.	Transportasi dan pergudangan	847.570,88	947.212,79	1.011.672,79	1.157.149,38
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.213.419,78	1.353.199,43	1.524.987,42	1.744.296,73
10.	Informasi dan komunikasi	874.942,09	967.781,54	1.049.111,43	1.240.701,93
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	540.086,00	595.681,21	673.296,11	733.778,45
12.	Real Estate	356.189,95	392.362,52	425.693,47	438.721,97
13.	Jasa Perusahaan	73.941,95	83.958,04	96.344,32	108.761,53
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	671.060,41	726.076,81	783.998,07	843.936,65
15.	Jasa pendidikan	1.346.913,38	1.469.391,02	1.631.539,47	1.809.177,68
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	234.464,80	258.757,16	286.874,15	311.630,04
17.	Jasa lainnya	618.937,28	665.107,08	756.995,85	830.461,31
TOTAL		30.892.205,57	34.447.079,42	37.340.820,52	40.083.963,30

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2018

Jika diperhatikan PDRB perkapita Kabupaten Brebes terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar 13,11 juta rupiah dan empat tahun kemudian meningkat menjadi 19,31 juta rupiah atau meningkat sebesar 47,29 persen. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata 10,82 persen per tahun. Nilai pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,47 persen (BPS Provinsi Jawa Tengah, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2017, BPS, Semarang, 2017). Selain itu nilai pertumbuhan ini juga jauh di atas inflasi Brebes dalam periode yang sama.

Tabel 1.6
Persentase PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 – 2017

NO.	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41.37	40.98	40.46	38.42
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.12	2.30	2.33	2.37
3.	Industri Pengolahan	13.90	14.58	15.03	15.54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.05	0.06	0.06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	0.06	0.06	0.06	0.05
6.	Konstruksi	4.07	4.37	4.05	4.15
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	16.50	16.01	16.01	16.41
8.	Transportasi dan pergudangan	2.74	2.75	2.70	2.89
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.93	3.93	4.07	4.35
10.	Informasi dan komunikasi	2.83	2.81	2.81	3.10
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	1.75	1.72	1.78	1.83
12.	Real Estate	1.15	1.14	1.14	1.09
13.	Jasa Perusahaan	0.24	0.24	0.26	0.27
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2.17	2.11	2.10	2.11
15.	Jasa pendidikan	4.36	4.27	4.36	4.51
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.76	0.75	0.77	0.78
17.	Jasa lainnya	2.00	1.93	2.02	2.07
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Brebes Dalam Angka Kabupaten Brebes, 2018

6. SDM Pemerintah Kabupaten Brebes

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan Buku Brebes Dalam Angka Tahun 2018 sebanyak 10.770 orang yang terdiri dari PNS laki-laki 5.995 orang dan PNS perempuan sebanyak 4.775 orang.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Brebes Tahun 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD / Sederajat	5	0	5
2.	SLTP / Sederajat	27	0	27
3.	SLTA / Sederajat	2.023	945	2.968
6.	Diploma	277	543	820
7.	Sarjana, Magister & Spesialis	3.663	3.287	6.950
	JUMLAH	5.995	4.775	10.770

Sumber : BDA Kab. Brebes Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Brebes membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal, berintegritas dan mempunyai kinerja yang baik sehingga maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Disamping SDM juga diperlukan penerapan teknologi pendukung kinerja pemerintahan. Beberapa pekerjaan sekarang sudah berbasis aplikasi atau web, diantaranya :

- SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIMDA (Sistem Keuangan Daerah)
- SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)
- SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
- SITAMPAN (Sistem Administrasi Pengadaan dan Pengadaan Langsung)
- SIM IKM (Sistem Informasi Indek Kepuasan Masyarakat)
- SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- SIMKEUDES (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa)
- SIRUP (Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan)

C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, sejumlah 21 Dinas, yaitu :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora)
 - Dinas Kesehatan (Dinkes)
 - Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
 - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)
 - Dinas Sosial (Dinsos)
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil)
 - Dinas Perhubungan (Dinhub)
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik)
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)
 - Dinas Perikanan (Dinkan)
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
5. Badan
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda)
 - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
6. Lembaga Teknis Daerah lainnya yang masih menunggu peraturan lebih lanjut, yaitu :
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 - RSUD Brebes
 - RSUD Bumiayu
 - Sekretariat BNK.
7. Kecamatan sejumlah 17 Kecamatan, yaitu :
- Kecamatan Brebes
 - Kecamatan Wanasari
 - Kecamatan Bulakamba
 - Kecamatan Jatibarang
 - Kecamatan Songgom
 - Kecamatan Tanjung
 - Kecamatan Losari
 - Kecamatan Larangan
 - Kecamatan Ketanggungan
 - Kecamatan Kersana
 - Kecamatan Banjarharjo
 - Kecamatan Tonjong
 - Kecamatan Bumiayu
 - Kecamatan Sirampog
 - Kecamatan Paguyangan
 - Kecamatan Bantarkawung
 - Kecamatan Salem
- Kelurahan sejumlah 5 kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Brebes
 - Kelurahan Pasarbatang
 - Kelurahan Limbangan Wetan
 - Kelurahan Limbangan Kulon
 - Kelurahan Gandasuli
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

D. Permasalahan Utama Kabupaten Brebes Tahun 2018

Ada beberapa permasalahan utama yang sedang berkembang di Kabupaten Brebes pada tahun 2018, diantaranya upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan serta kemiskinan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Adapun permasalahan utama Kabupaten Brebes, secara singkat di rinci sebagai berikut :

- 1) Angka kemiskinan masih tinggi
- 2) Nilai IPM masih rendah di Provinsi Jawa Tengah
- 3) Tingkat pengangguran yang masih tinggi
- 4) Angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah
- 5) Iklim investasi yang belum kondusif
- 6) Banyaknya daerah rawan bencana
- 7) Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana infrastruktur terutama jalan
- 8) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
- 9) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes adalah perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, misi pembangunan agar pembangunan lebih terarah dan terukur dalam pencapaian sasaran strategis selama lima tahun.

Tahun 2018 merupakan tahun transisi dari RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012–2017 dan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017–2022. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada RPJMD Tahun 2012–2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2012-2017 adalah untuk mencapai visi:

“Terwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun. Penjelasan visi Kabupaten Brebes tersebut adalah :

1. Masyarakat yang mandiri dan produktif, mengandung makna bahwa pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Brebes untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya pada bidang ekonomi, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang besar sehingga secara produktif mampu meningkatkan pendapatannya.

2. Masyarakat yang sejahtera, mengandung makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan secara layak.
3. Berkeadilan dalam pembangunan daerah, mengandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan kondisi kehidupan yang layak dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan dan kesetaraan, serta memperlakukan masyarakat tanpa diskriminatif pada seluruh bidang kehidupan.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi, dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan Memperhatikan Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

c. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam mewujudkan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas, relevansi dan keterjaminan pelayanan pendidikan;
3. Meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan;
4. Menanamkan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama dan pengembangan budaya religius di masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas;
7. Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan;
8. Meningkatkan pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
9. Meningkatkan investasi untuk menunjang pengurangan pengangguran;
10. Mengembangkan pariwisata dan budaya unggulan daerah;
11. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan pembangunan desa untuk mengurangi kemiskinan;
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana perhubungan dan transportasi secara merata;
13. Meningkatkan pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman yang berkualitas;
14. Meningkatkan penataan ruang dan pelaksanaan tata ruang secara konsisten;
15. Meningkatkan pelestarian lingkungan, sumber daya alam dan mitigasi bencana;
16. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;

17. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak;
18. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat;
19. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
20. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas;
21. Meningkatkan tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
22. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

d. Strategi

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan, ditindaklanjuti dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemerataan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan;
- 2) Menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa melalui pendidikan agama dengan penguatan peran guru agama, dan pengembangan budaya religius di lingkungan sekolah;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- 4) Meningkatkan promosi/sosialisasi kesehatan untuk menciptakan kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
- 5) Meningkatkan produksi bahan pangan dengan peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- 6) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dan inovasi pada bidang pertanian, UMKM, industri padat karya serta tumbuh dan berkembangnya potensi rakyat;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui perbaikan saluran irigasi, distribusi sarana produksi;
- 8) Meningkatkan penerapan inovasi dan teknologi tepat guna pada proses produksi dan industri pengolahan hasil pertanian/ perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
- 9) Meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Industri Kecil dan Menengah melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk;

- 10) Mengembangkan usaha koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus Koperasi mengenai manajemen koperasi;
- 11) Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten yang berkondisi rusak berat, dan melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan;
- 12) Meningkatkan perbaikan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier;
- 13) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh;
- 14) Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi melalui fasilitasi sarana air bersih;
- 15) Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana alam, dan penyediaan sarana prasarana untuk mengantisipasi terjadinya bencana;
- 16) Meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender secara bertahap di seluruh SKPD;
- 17) Meningkatkan, pelibatan perempuan dalam berbagai forum publik, dan peningkatan pendidikan politik bagi perempuan;
- 18) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana layak anak, bekerjasama dengan berbagai lembaga dan pihak terkait;
- 19) Peningkatan kualitas pelayanan anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum;
- 20) Meningkatkan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui optimalisasi potensi kelembagaan sosial masyarakat, dan penguatan gerakan sosial masyarakat;
- 21) Pemberian jaminan sosial dengan seleksi secara selektif sehingga tepat sasaran;
- 22) Meningkatkan updating data dan informasi secara berkala melalui evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- 23) Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, penetapan standar pelayanan publik, pengukuran indeks kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan;
- 24) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah, pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan, pendataan asset daerah, penyusunan mekanisme pengelolaan asset daerah, dan pengawasan pemanfaatan asset daerah;

25) Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui optimalisasi peran satuan polisi pamong praja.

e. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2018

Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2027, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, maka RKPD Kabupaten Brebes tahun 2018 mengambil fokus tema: **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Publik Guna Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat.”**

Disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2012-2017 sebagai Acuan Prioritas Tahun 2018 (masa transisi)	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2018
1.	Peningkatan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.	1. Peningkatan pelayanan dasar Pendidikan
2.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau.	2. Peningkatan pelayanan dasar Kesehatan
3.	Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	3. Pengembangan produksi pertanian, kelautan dan perikanan dan potensi UMKM untuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis ekonomi kerakyatan
		4. Pengembangan inovasi daerah, seni budaya, pariwisata, kreativitas pemuda, dan olah raga

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2012-2017 sebagai Acuan Prioritas Tahun 2018 (masa transisi)	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2018
4.	Pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan pro lingkungan	5. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
5.	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.	6. Peningkatan jaminan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak
6.	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.	7. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta penciptaan stabilitas daerah

f. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018

Mendasarkan pada isu strategis, sasaran pembangunan tahun 2018 sebagai tahun Transisi, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya akses dan Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> * Angka Partisipasi Murni SD/MI * Angka Melek Huruf * Angka Melanjutkan Sekolah * Rata-Rata Nilai UN
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> * Prevalensi Penyakit : <ul style="list-style-type: none"> - IR DBD - Kasus HIV - Diare - TB Paru

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
		* Angka kematian ibu melahirkan (AKI/100.000 KLH) * Angka kematian bayi/ 1.000 KLH * Prevalensi Gizi Buruk
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	* IKM terhadap Pelayanan Kesehatan
4	Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)) Ketersediaan Cadangan Pangan
5	Meningkatnya Perekonomian Rakyat) Prosentase Pertumbuhan Investasi) Prosentase Koperasi Sehat) Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitas
6	Meningkatnya usaha pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran) Angka Kemiskinan) Menurunnya Prosentase tingkat Pengangguran Terbuka
7	Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)) Prosentase PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial) Prosentase PMKS yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi
8	Meningkatnya Infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik) Prosentase jalan dalam kondisi baik) Cakupan akses air minum layak) Cakupan akses jamban) Persentase kawasan bebas banjir perkotaan
9	Meningkatkan Mutu Hunian Masyarakat dan Lingkungan Hidup) Prosentase rumah layak huni) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : - Pencemaran Air - Pencemaran Udara - Lahan Kritis
10	Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender) Indeks Pembangunan Gender (IPG)) Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
11	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Layak Anak dan Perlindungan Anak) Jumlah Kelurahan / Desa Layak Anak) Prosentase Penyelesaian Pengaduan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih) Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah) Nilai SAKIP) Nilai LPPD) Nilai IKM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat/dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2018, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes.

Diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2018 tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Tahun 2018. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja, tercantum sasaran strategis, indikator kinerja setiap sasaran strategis, dan target setiap indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kerjanya pada akhir tahun.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja secara lengkap disajikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dan pengukuran kinerja sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan.

Pengukuran kinerja sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 dengan capaian kerjanya pada akhir tahun 2018 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tdk Berhasil

2. Capaian Kinerja Sasaran

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indicator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil dan sangat tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jml Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	: 95
Berhasil	: 82,5
Cukup Berhasil	: 70
Tidak Berhasil	: 57,5
Sangat Tidak Berhasil	: 25

B. Capaian Kinerja 2018

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2018. Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 6 Misi dan 12 (Dua belas) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 99,80%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 75% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Brebes ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2018, Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Hingga akhir tahun 2018 capaian indikator kinerja utama Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018
Capaian Kinerja Sasaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3
1	Meningkatnya akses dan Kualitas Pendidikan	101.61
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	145.19
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	101.50
4	Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian	99.25
5	Meningkatnya Perekonomian Rakyat	91.89
6	Meningkatnya usaha pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	80.14
7	Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	90.77
8	Meningkatnya Infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik	104.52
9	Meningkatkan Mutu Hunian Masyarakat dan Lingkungan Hidup	100.07
10	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	97.70
11	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Layak Anak dan Perlindungan Anak	84.38
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	100.59
Rata – rata Capaian Kinerja Tahun 2018		99.80%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 36 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- ▶ 26 indikator dengan kategori "Sangat berhasil"
- ▶ 6 indikator dengan kategori "Berhasil"
- ▶ 2 indikator dengan kategori "Cukup Berhasil"
- ▶ 2 indikator dengan kategori "Tidak Berhasil"

Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2018 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	% Capaian Kinerja 2017	2018			Status capaian 2018 terhadap 2017	Ket.
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI	97.11%	92.14%	92.18%	100.04%	△	△ = naik ▽ = turun ○ = tetap
2	Angka Melek Huruf	94.15%	95.00%	95.00%	100.00%	△	
3	Angka Melanjutkan Sekolah	94.03%	100%	94.72%	94.72%	△	
4	Rata - rata nilai UN	95.71%	53.54	59.79	111.67%	△	
5	Prevalensi IR DBD	173.50%	9	1.84	179.60%	△	
6	Prevalensi Kasus HIV	87.60%	65.00%	62.36%	95.94%	△	
7	Prevalensi TB Paru	103.70%	70.00%	100.00%	142.86%	△	
8	Angka kematian ibu melahirkan (AKI/100.000 KLH)	100.00%	30	31	103.33%	△	
9	Angka kematian bayi/ 1.000 KLH	102.40%	12.3	10.07	122.14%	△	
10	Prevalensi Gizi Buruk	66.07%	0.25	0.11	227.27%	△	
11	IKM terhadap Pelayanan Kesehatan	86.50%	76	77.14	101.50%	△	
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97.85%	91.09	90.97	99.87%	△	
13	Ketersediaan Cadangan Pangan	87.24%	1023.35 Ton	1009.35 Ton	98.63%	△	
14	Prosentase Pertumbuhan Investasi	52.00%	100.00%	52.55%	52.55%	△	
15	Prosentase Koperasi Sehat	128.38%	6.84%	6.48%	94.74%	▽	
16	Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitas	100.00%	4.44%	5.70%	128.38%	△	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	% Capaian Kinerja 2017	2018			Status capaian 2018 terhadap 2017	Ket.
			Target	Realisasi	% Capaian		
17	Angka Kemiskinan	106.33%	19.14	17.17	89.71%	△	
18	Menurunnya Prosentase tingkat Pengangguran Terbuka	61.15%	5.13%	7.27%	70.56%	△	
19	Prosentase PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial		31.94%	27.00%	84.53%		
20	Prosentase PMKS yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi		68.00%	66.00%	97.00%		
21	Prosentase jalan dalam kondisi baik	100.50%	60.00%	68.11%	113.52%	△	
22	Cakupan akses air minum layak (%)	115.48%	90.00%	85.33%	94.81%	▽	
23	Cakupan akses jamban		70.00%	78.36%	111.94%		
24	Persentase kawasan bebas banjir perkotaan	100.00%	92.00%	90.00%	97.82%	△	
25	Prosentase rumah layak huni	99.41%	89.77%	90.00%	100.26%	△	
26	Pencegahan Pencemaran Air (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	○	
27	Pencegahan Pencemaran Udara (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	○	
28	Luas Lahan Kritis (Ha)	100.00%	10	10	100.00%	○	
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.21%	90.00	85.86	95.40%	△	
30	Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	○	
31	Jumlah Kelurahan / Desa Layak Anak	100.00%	16	11	68.75%	▽	
32	Prosentase Penyelesaian Pengaduan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	○	
33	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WDP		○	
34	Nilai SAKIP	CC	B	B	100.00%	△	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	% Capaian Kinerja 2017	2018			Status capaian 2018 terhadap 2017	Ket.
			Target	Realisasi	% Capaian		
35	Nilai LPPD	T	ST	ST	100.00%	△	
36	Nilai IKM	87.26%	78	78.46	100.59%	△	

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata – rata sesuai dengan Metode rata-rata data kelompok, maka dari 12 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja tersebut, memiliki capaian kinerja masing – masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Jml Indika tor	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd 65	Sedan g 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
1.	Meningkatnya akses dan Kualitas Pendidikan	4	101,61	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	4
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	6	145,19	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	6
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1	101,50	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
4	Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian	2	99,25	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	2
5	Meningkatnya Perekonomian Rakyat	3	91,89	Sangat tinggi	-	-	1	-	-	2
6	Meningkatnya usaha pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	2	80,14	tinggi	-	-	-	1	1	-

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
7	Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2	90.77	Sangat Tinggi	-	-	-	-	1	1
8	Meningkatnya Infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik	4	104.52	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	4
9	Meningkatkan Mutu Hunian Masyarakat dan Lingkungan Hidup	4	100.07	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	4
10	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	2	97.70	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
11	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Layak Anak dan Perlindungan Anak	2	84.38	Tinggi	-	-	-	1	-	1
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	4	100,20	Sangat Tinggi	-	-	-	1	-	3
Rata-rata capaian Sasaran strategis			99,80	Sangat Tinggi	-	-	1	3	2	30

Rata – rata capaian sasaran strategis sebesar 99,80 % dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis:

- ◀ 10 Sasaran dengan kategori sangat Tinggi
- ◀ 2 Sasaran dengan kategori Tinggi

CAPAIAN KINERJA MENURUT MISI

Adapun capaian indikator kinerja sasaran menurut misi dapat disimpulkan dari 36 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi

No	Misi/kategori	Jumlah indikator	Presentase
1	MISI 1	4	101,61%
	Sangat Berhasil	4	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
2	MISI 2	7	123,35%
	Sangat Berhasil	7	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
3	MISI 3	9	93,31%
	Sangat Berhasil	4	
	Berhasil	2	
	Cukup Berhasil	2	
	Tidak Berhasil	1	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
4	MISI 4	8	102,29%
	Sangat Berhasil	7	
	Berhasil	1	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	

5	MISI 5	4	91.04%
	Sangat Berhasil	3	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	1	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
6	Misi 6	4	100,59%
	Sangat Berhasil	3	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	1	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

MISI I : Meningkatnya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2012–2017, terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu Angka Partisipasi Murni, Angka Melek Huruf, Angka Melanjutkan sekolah dan rata – rata nilai UN. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut :

Tabel. 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni	%	92.14	92,18	100,04%	97,11%
	Angka Melek huruf	%	95.00	95,00	100,00%	94,15%
	Angka melanjutkan sekolah	%	100.00	94,72	94,72%	94,03%
	Rata – rata nilai UN	Nilai rata-rata	53.54	59.79	111.67%	95,54%
Rata – rata					101,61%	95,25%

Secara umum capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dapat dicapai yaitu sebesar 101,61% atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** dan melampaui target yang ditetapkan.

Akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Keberhasilan dalam peningkatan akses perlu disertai komponen kualitas. Untuk itu beragam upaya telah dilakukan untuk mencapai akses pendidikan yang berkualitas tersebut, diantaranya :

- (1) memperluas akses pendidikan prasekolah;
- (2) melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan inisiasi pendidikan universal 12 tahun;
- (3) memfokuskan intervensi untuk anak dari keluarga miskin;
- (4) meningkatkan kualitas ujian nasional; dan
- (5) mendesentralisasikan sistem dan layanan pendidikan.

Akses dan kualitas pendidikan merupakan dua hal yang mendasar terkait layanan pendidikan. Yang pertama dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan yang kedua adalah kapasitas dan profesionalitas guru.

➤ **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Tabel. 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja APM

No	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja 2017	2018			% Realisasi Th. 2018 thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI	97,11%	92.14%	92,18%	100,04%	100,04%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Angka Partisipasi Murni sebesar 100,04% maka dikategorikan Sangat Berhasil, Bila dibanding dengan tahun 2017 maka relatif sama naik 6.04 poin, sehingga tidak banyak perubahan dalam pencapaian target dan untuk kegiatan yang menunjang sasaran tersebut terlaksana dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni dicapai dengan dukungan kegiatan :

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah negeri dan swasta;
- b. Pemberian beasiswa siswa miskin;
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah SMP Negeri dan swasta, rehabilitasi ruang kelas rusak;
- d. Rehab/ renovasi dan Penambahan ruang kelas baru SMP;
- e. Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
- f. Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar SP Negeri Terbuka;
 - J Pemberian BOS merupakan solusi yang baik dari Pemerintah. Dengan adanya BOS maka program wajib belajar 9 tahun bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian tidak ada alasan bagi siswa tidak mampu untuk tidak sekolah karena untuk pendidikan dasar sudah digratiskan oleh Pemerintah.
 - J Memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu bisa membantu untuk menyediakan kebutuhan sekolah mereka.

Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai **strategi/upaya pemecahan masalah** untuk meningkatkan kondisi yang sudah tercapai, yaitu dengan Mengoptimalkan BOS dan BSM, Mengoptimalkan program Wajib Belajar sembilan tahun dan Memberikan pengetahuan kepada masyarakat / sosialisasi pentingnya sekolah.

➤ **Angka Melek Huruf (AMH)**

Tabel. 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja AMH

No	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja 2017	2018			% Realisasi Th. 2018 thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Melek Huruf	94,15%	95.00%	95,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian Indikator Angka Melek Huruf 100,00% yang dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator utama/penting untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan. Di perkotaan penduduk yang menyekolahkan ke Pendidikan Anak Usia Dini sudah bertambah banyak, sementara di perdesaan persetase angka partisipasi sekolah masih kecil.

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga Negara. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin dan huruf lainnya. Realisasi tahun 2018 sebesar 100,00 % telah menunjukkan hasil yang positif karena telah memenuhi target tahun 2018.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain dengan digalakkannya program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket. Pemerintah Kabupaten Brebes juga mempunyai program Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang menjadi pilar tersendiri untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes. Selain dari Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden, Pemerintah Kabupaten Brebes juga menggulirkan Kartu Brebes Cerdas (KBC) untuk meringankan beban bagi siswa yang kurang mampu, perbaikan sarana prasarana pendidikan. Disamping itu peningkatan pengetahuan masyarakat melalui perpustakaan (Taman Bacaan Masyarakat) dan kesadaran akan pentingnya bisa baca tulis juga mempengaruhi keberhasilan sasaran ini.

Peran pemerintah yang sangat tinggi dan kontribusi penting dari pihak swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Meskipun telah melampaui target

jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun masih terdapat beberapa permasalahan/hambatan antara lain masalah kemiskinan dan kondisi geografis Kabupaten Brebes yang kurang terjangkau akses pendidikan.

Adapun **upaya pemecahan masalah** yang dilakukan Pemkab Brebes yaitu pemanfaatan dana BOS secara optimal dan BSM, Penyelenggaraan pendidikan Kejar Paket A/B dan C serta pembangunan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai.

➤ Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

*Tabel. 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja AMS*

No	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja 2017	2018			% Realisasi Th. 2018 thd Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Angka Melanjutkan Sekolah	94,03%	100%	94,72%	94,72%	94,72%

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas yaitu 94,72% maka dikategorikan **Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 relatif sama, namun angka melanjutkan Sekolah di Kabupaten Brebes masih terbilang rendah, hal ini dikarenakan banyaknya anak putus sekolah yang disebabkan faktor ekonomi dan kemiskinan, budaya masyarakat yang masih berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah dan adanya beberapa daerah tertentu yang masih kesulitan dalam mengaksesnya.

Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian target yaitu masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, masih ada anak usia sekolah lebih memilih bekerja dan kondisi geografis beberapa wilayah yang masih jauh/sulit menjangkau pendidikan.

Adapun **strategi/upaya pemecahan** masalah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Brebes antara lain meningkatkan akses/jangkauan layanan pendidikan ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuntaskan Buta Huruf dan mengoptimalkan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) untuk mengembalikan 1212 anak putus sekolah serta mengembalikan anak yang tidak melanjutkan sekolah ke pendidikan jenjang lebih tinggi.

➤ **Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)**

Ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) disebut Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Capaian rata – rata nilai UN mencapai 94.72% yang dikategorikan **Berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu 94.03% relatif sama.



Gambar 3.1.
Pelaksanaan UNBK Tingkat SMP di Kabupaten Brebes

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pencapaian nilai UN yaitu melalui pengembangan pendekatan dan strategis pembelajaran. Dengan pendekatan dan strategis pembelajaran yang inovatif diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan menstimulasi pengembangan potensi siswa. Disamping itu kualitas dan profesionalitas pengajar juga ditingkatkan.

Adapun **Program yang dilakukan** untuk menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan adalah :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;

4. Program Pendidikan non formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
7. Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Anggaran yang digunakan untuk mencapai Sasaran tersebut sebesar Rp 254.686.291.000,- dan terealisasi Rp. 213.335.287.678,- mencapai 83,76% dengan efisiensi mencapai 16,24%.

MISI II : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Ditunjang oleh Pelayanan yang bermutu dan Terjangkau

Sasaran Strategis 2.1
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2012 – 2017, terdiri dari 6 Indikator Kinerja yaitu Prevalensi penyakit : IR DBD per 100.000 penduduk; Kasus HIV; TB Paru; Angka Kematian ibu melahirkan (AKI/100.000 KLH), Angka Kematian Bayi/1.000 KLH, Penurunan Prevalensi Gizi buruk. Hasil evaluasi dari Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat rata – rata 123,35% dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	% capaian Th. 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	% capaian
1.	Prevalensi penyakit:					
	- IR DBD	100.000 pddk	173.50	9	1,84	179,60
	- Kasus HIV	%	87.60	65.00	62.36	95.94
	- TB Paru	%	103,70	70.00	100.00	142.86
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI/100.000KLH)	100.000 KLH	100.00	30	31	103,33
3	Angka Kematian Bayi /1.000 KLH	1.000 KLH	102,40	12,3	10,07	122,14
4	Prevalensi Gizi Buruk	%	66.07	0,25	0,11	227,27

➤ **Prevalensi Penyakit**

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang. Prevalensi dihitung dengan membagi jumlah orang yang memiliki penyakit atau kondisi dengan jumlah total orang dalam kelompok.

Prevalensi penyakit di Kabupaten Brebes mencakup :

- IR DBD per 100.000 penduduk dengan prosentase capaian 179,60 %
- Kasus HIV dengan prosentase capaian 95.94%
- TB Paru dengan prosentase capaian 142,86%

Rata – rata dari capaian Indikator Kinerja Prevalensi Penyakit 139,47% dapat dikategorikan sangat baik. Indikator Kinerja Prevalensi Penyakit ini terdiri dari :

Demam Berdarah (DBD)

Penyakit Demam Berdarah (DBD) hingga saat ini masih menjadi masalah yang utama di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2018 Kasus DBD di Kabupaten Brebes menurun yaitu dari target 9% terealisasi 1,84% dengan prosentase capaian 179,60% yang dikategorikan **sangat berhasil**.

Hal ini disebabkan karena beberapa Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi yaitu ada tujuh kegiatan pokok dalam pengendalian DBD antara lain pengobatan dan tatalaksana penderita, pengendalian vektor, peningkatan peran serta

masyarakat, jejaring kemitraan, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan tujuh kegiatan pokok pengendalian DBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes juga menyusun rencana kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) oleh siswa sekolah, dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

HIV

Hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja prevalensi HIV mencapai 95.94% dari target 65.00% dan realisasi 62.36%, yang dikategorikan **sangat berhasil**.

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mencatat, jumlah penderita baru HIV/AIDS tahun 2018 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Tahun 2018 terdapat penderita HIV/AIDS yang baru melaporkan/memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Ada 2 (dua) utama yang menyebabkan capaian indikator ini belum dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu:

- Ketersediaan reagen pemeriksaan HIV di Kabupaten Brebes yang terbatas sehingga tidak bisa mencakup seluruh sasaran yang beresiko terinfeksi HIV.
- Kesadaran masyarakat yang beresiko terinfeksi HIV untuk memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.

Sejauh ini, penanganan dan pencegahan penderita HIV/ AIDS menghadapi banyak kendala, antara lain masih minimnya kesadaran penderita dari penderita itu sendiri. Pemerintah daerah memberikan fasilitas gratis dalam pengobatan penderita HIV/ AIDS. Hanya 30 persen dari penderita HIV/AIDS yang mau berobat.

Berbagai upaya/ strategi telah dilakukan Pemkab Brebes bersama organisasi dan masyarakat yang peduli bahaya HIV/ AIDS. Salah satunya, melalui sosialisasi dan kampanye bahaya HIV/ AIDS kepada pelajar. Mereka diberikan pengetahuan untuk mengenal HIV/AIDS dan cara penularannya. Tidak hanya itu, kegiatan lain juga sudah dilaksanakan di antaranya pembentukan warga dan pelajar peduli AIDS. Pemberian pengetahuan HIV/AIDS sedini mungkin, Pendampingan ODHA, Pengembangan layanan VCT/PITC. Sehingga bisa dicapai semua penderita dapat tertangani.

TB Paru

Angka kesembuhan TB Paru tercapai kurang dari target yaitu 87% dari target 70.00% dengan realisasi 100.00% yang dikategorikan **sangat berhasil**.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk penyembuhan TB Paru adalah dengan pengobatan gratis di Balai Paru dan Kusta. Disamping itu juga pendampingan pengobatan oleh petugas.



Gambar 3.2.

*Balai Pengobatan Paru dan Kusta
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes*

Adapun Program yang dilaksanakan untuk keberhasilan pencapaian Indikator Prevalensi Penyakit adalah :

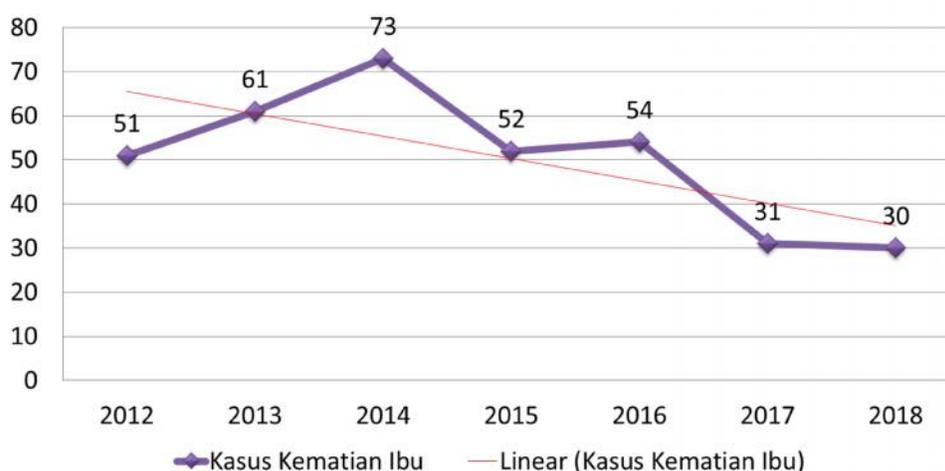
1. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk;
2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;
3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
4. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik;
5. Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah.

➤ **Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI/100.000KLH)**

Capaian kinerja tentang kasus kematian ibu pada tahun 2018 telah melampaui target yaitu sebesar 103.33% dan capaiannya dikategorikan **sangat baik**. Capaian kinerja pada tahun 2018 juga lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 100%.

Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.1
Kasus Kematian Ibu



Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan maternal prenatal di institusi pelayanan kesehatan.

Hasil evaluasi dari penyebab kematian ibu melahirkan tersebut sebagian besar disebabkan karena :

1. Pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai;
2. Adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung atau hipertensi.

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan resiko yang dihadapi ibu – ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang tidak baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu melahirkan, yaitu dengan Program **“Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng”** pada dua tahun ini yang berhasil menurunkan AKI dan angka kematian bayi (AKB) kita sekitar 25 persen. Keberhasilan Kabupaten Brebes

menurunkan AKI dan AKB tidak terlepas dari terobosan "*one student one client*", yakni setiap mahasiswa akademi kebidanan ditugasi untuk mendampingi satu orang ibu hamil. Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan upaya pendampingan terhadap ibu hamil dengan melibatkan masyarakat, termasuk PKK dan mahasiswa. Bahkan juga Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki gerakan "**Brebes Kawal Wong Meteng**" yang hasilnya kematian ibu melahirkan di Brebes menurun.

➤ **Angka Kematian Bayi /1.000 KLH**

Angka kematian Bayi /1.000 KLH memiliki capaian **sangat baik** yaitu 122.14% targetkan 12,3/1.000 KLH tercapai 10,07/1.000 KLH atau 403 kasus kematian bayi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu 102.40%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan antenatal yang berkualitas atau ANC terintegrasi.
2. Pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran;
3. Pemanfaatan PONEK dan PONEK yang maksimal. Dengan pemanfaatan PONEK yang maksimal diharapkan dapat meminimalkan kasus keterlambatan rujukan dan mengurangi biaya berlebihan di PONEK, ini dikarenakan jumlah rujukan yang lebih banyak ke PONEK.
4. Peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kesehatan khususnya bidan sesuai dengan perkembangan teori baru.

Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya keras dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB, antara lain :

1. Peningkatan SDM petugas dengan pelatihan dan pertemuan yang memberikan informasi/desiminasi informasi tentang protap penatalaksanaan gawat darurat ibu dan anak;
2. Kegiatan pembelajaran audit maternal perinatal yang bertujuan sebagai bahan pembelajaran kepada petugas kesehatan;
3. Program lanjutan EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Kabupaten Brebes, dengan harapan dapat menjadi daya ungkit untuk penurunan AKI dan AKB.

➤ **Penurunan Prevalensi Gizi Buruk**

Prosentase gizi buruk adalah prosentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasien penderita gizi buruk di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menempati ranking tertinggi di Jawa Tengah. Para penderita ini umumnya berasal dari keluarga miskin dan tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Brebes terbanyak seJawa Tengah sehingga penderita gizi buruk banyak, disamping itu juga disebabkan bencana banjir yang sempat pada tahun 2018 yang merendam di beberapa kecamatan.

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya keras untuk mengatasi penurunan prevalensi gizi buruk ini, dengan capaian yang melebihi target. Dari yang ditargetkan 0,25% tercapai 0,11% dan masuk kategori **sangat berhasil**.

Beberapa upaya perbaikan gizi masyarakat/ penanganan gizi buruk di Kab Brebes antara lain :

1. Pada beberapa puskesmas diadakan pusat terapi pemulihan gizi atau TFC;
2. Sosialisasi dan penerapan keluarga sadar gizi (Kadarzi) ;
3. Pembentukan Komunitas pemulihan gizi atau CFC (Community Feeding Center) Berbasis Masyarakat (PPGBM) yang berada di desa yang berfungsi untuk merawat gizi buruk rawat jalan, khususnya pasca rawat inap di rumah sakit dan TFC, serta puskesmas rawat inap. CFC ini diharapkan agar masyarakat dapat secara langsung dalam menanggulangi gizi buruk. Termasuk bagaimana cara membuat formula makanan untuk pasien gizi buruk seperti formula 100 yang terdiri dari susu minyak sayur dan gula;
4. Pemantauan penimbangan balita di posyandu untuk penjarangan kasus gizi buruk;
5. Penanganan dengan BPJS dan menyediakan alokasi untuk pasien non BPJS dengan anggaran yang sudah disediakan dengan menunjuk Rumah Sakit rujukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dengan dilaksanakannya Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi;
2. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin;
3. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya.
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 27.561.784.139,- atau 91,90% dari total pagu sebesar Rp. 29.990.425.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,10% dari pagu yang ditentukan.

Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	% capaian Th. 2017	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% capaian
IKM terhadap pelayanan kesehatan	%	86.50	76.00	77.14	101.50

Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan mempunyai 1 Indikator yaitu IKM terhadap pelayanan kesehatan dasar

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan dasar**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan hasil evaluasi capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan telah melampaui target 101,50% dan masuk dalam **sangat berhasil**, ditargetkan 76 tercapai 77,14.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 86,50%, capaian Indikator Kinerja IKM terhadap Pelayanan kesehatan dasar tahun 2017 ada kenaikan cukup signifikan, hal ini dikarenakan ada perbedaan diangka target yang ditetapkan, yang merupakan proses untuk menjadikan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun **upaya yang dilakukan** untuk peningkatan IKM terhadap pelayanan kesehatan dasar adalah dengan :

1. Penataan Organisasi yang efektif dan efisien dengan struktur dan uraian tugas yang tidak tumpang tindih;
2. Regulasi/peraturan perundangan yang telah ada diikuti dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten, kreatif dan inovasi serta memiliki moral dan etika;
4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pasien.

Program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan IKM pelayanan kesehatan yaitu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan kegiatan :

1. Pembangunan Puskesmas;
2. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas;

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 49.953.822.688,- atau 92,78% dari total pagu sebesar Rp. 53.841.327.500,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,22% dari pagu yang ditentukan.

Misi III : Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan Memperkuat Inovasi Daerah guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

**Sasaran Strategis 3.1
Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian**

Sasaran Strategis “Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian” terdiri dari 2 Indikator Kinerja yaitu : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Ketersediaan Cadangan Pangan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Brebes. Dari sekitar 1,7 juta penduduk Brebes, sekitar 70 persen bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang 53 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes, yang 50 persen dari pertanian bawang merah. Bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan *trade mark* mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditi tersebut di tataran nasional. Pusat bawang merah tersebar di 11 kecamatan (dari 17 kecamatan) dengan luas panen per tahun 20.000 - 25.000 hektare. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Jatibarang, dan sebagian Banjarharjo.



Gambar 3.2
Bawang Merah “Trade Mark” Kabupaten Brebes

Budidaya bawang merah diperkirakan mulai berkembang di Brebes sekitar tahun 1950, diperkenalkan warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Brebes. Hingga kini budidaya bawang merah menjadi

napas kehidupan masyarakat. Berbagai varietas bawang unggulan juga dihasilkan dari Brebes, antara lain varietas Bima Brebes yang berwarna merah menyala, rasa lebih pedas dan lebih keras dibandingkan bawang dari luar daerah atau luar negeri. Saat ini, sekitar 23 persen pasokan bawang merah nasional berasal dari Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Brebes memasok sekitar 75 persen kebutuhan bawang merah.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Revitalisasi Sektor Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor pola pangan harapan (PPH)	91,09	90,97	99,87
	Ketersediaan cadangan pangan	Ton	1.023.350	1.009.350	98,63
Jumlah Rata-rata					99,25

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja diatas yang telah ditetapkan pada 2 Indikator Kinerja mendapat angka nilai rata – rata capaian sebesar 99,25% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

➤ **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO–RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacang, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, Budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2018 ini, skor PPH di Kabupaten Brebes sebesar 91,09 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun 2018 tercapai 90,97 (99,87%), seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Brebes Tahun 2018

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)*	% AKG	Bobot	Skor riil	Skor PPH**	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.031,1	48,0	0,5	24,0	24,0	25,0
2.	Umbi-umbian	81,3	3,8	0,5	1,9	1,9	2,5
3.	Pangan Hewani	222,4	10,3	2,0	20,7	20,7	24,0
4.	Minyak dan Lemak	246,7	11,5	0,5	5,7	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	16,3	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0
6.	Kacang-kacangan	85,7	4,0	2,0	8,0	8,0	10,0
7.	Gula	45,8	2,1	0,5	1,1	1,1	2,5
8.	Sayuran dan buah	173,1	8,0	5,0	40,2	30,0	30,0
9.	Lain-lain	30,1	1,4	-	-	-	-
Jumlah		2.188	101,8			87,85	100,0

Sumber:

* Cek dengan data Susenas atau data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah

** Expert judgement dengan ketentuan:

Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum.

Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

Berdasarkan tabel diatas bahwa Pola Pangan masyarakat Kabupaten Brebes masih di dominasi oleh beras/padi-padian, sementara

konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari umbu umbian. Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih bisa ditingkatkan mengingat Brebes merupakan penghasil ikan dan daging yang cukup besar. Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau ternak ikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun Kabupaten Brebes dalam menghadapi persaingan era global. Untuk itu, tubuh memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif.

Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandung lima kelompok zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2018 melalui program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan

1. Kegiatan Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan peningkatan Keragaman konsumsi pangan masyarakat Brebes meningkat melalui pendataan data skor pola pangan harapan Kabupaten Brebes

2. Kegiatan Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Neraca Bahan Makanan Kabupaten Brebes, Neraca bahan makanan merupakan alat kunci analisis yang menggambarkan data pangan dan pertanian di Brebes, memberikan gambaran menyeluruh tentang pasokan makanan di Brebes dalam periode waktu tertentu, menunjukkan ketersediaan secara kabupaten dari masing-masing jenis pangan

3. Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Brebes sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
4. Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
5. Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah tersedianya cadangan pangan daerah untuk menangani kejadian rawan pangan dan bencana di daerah.
6. Kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
7. Kegiatan Pengembangan lumbung pangan desa berkembang dan majunya lumbung pangan di Brebes
8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan keamanan dan kesehatan pangan segar di Brebes
9. kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternative penganeekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah tangga.

upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain:

- a. Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan
- b. Lomba cipta menu tingkat kabupaten dan Provinsi
- c. Pengembangan usaha pangan lokal

Adapun hambatan dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein, sebagai berikut :

- ❖ Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah
- ❖ Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal

- ❖ Konsumsi beras per kapita masih tinggi hal ini dikarenakan harga pangan pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media.

Perbandingan Capaian Kinerja akhir Renstra

Pencapaian target jangka menengah merupakan bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2018 dengan target lima tahunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Berdasarkan tabel dibawan dapat dilihat bahwa pencapain skor PPH Kabupaten Brebes sejak dari renstra tahun 2012 sampai dengan 2018 telah melebihi skor PPH tingkat Nasional.

Tabel 3.14

***Capaian Kinerja akhir Renstra Indikator
Meningkatkan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
melalui skor pola pangan harapan Kabupaten Brebes***

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH 2012	Skor PPH 2013	Skor PPH 2014	Skor PPH 2015	Skor PPH 2016	Skor PPH 2017	kor PPH 2018
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	24,0
2.	Umbi-umbian	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8	1,8	1,9
3.	Pangan Hewani	19,9	20,6	18,6	18,6	20,9	20,6	20,7
4.	Minyak dan Lemak	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0
7.	Gula	2,1	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5	1,1
8.	Sayuran dan buah	24,3	24,9	25,9	25,8	22,5	22,7	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	86,80	88,46	88,80	88,74	88,01	87,85	90,97
	Skor PPH Nasional	83,5	81,4	83,4	84,1	86,2	83,5	88,4

Catatan : skor PPH Nasional tahun 2017 merupakan target nasional

➤ **Ketersediaan Cadangan Pangan**

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Ketersediaan Cadangan pangan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Ketersediaan Cadangan Pangan	Ton	1.023.350	1.009.350	98,63

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa indikator kinerja masuk kategori **sangat baik**, karena pencapaian 98,63% dari target 1.023.350 terealisasi 1.009.350 ton. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, terjadi kenaikan sebesar 11,39%. Adapun peningkatan Produksi Pertanian Utama komoditas **padi, jagung dan bawang merah** yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Produksi Padi

Produksi padi tahun 2018 sebesar 560.116 ton, atau terealisasi sebesar 93,00 % dari taret dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018 sebesar 602.263 ton, pencapaian tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,96% (produksi padi tahun 2017 sebesar 583.253 ton).

2. Produksi Jagung

Produksi jagung tahun 2018 sebesar 145.463 ton, atau terealisasi sebesar 107,28 % dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017 sebesar 135.594 ton, pencapaian tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 13,383 % (produksi padi tahun 2017 sebesar 128.293 ton). Kenaikan produksi jagung di topang oleh kenaikan luas panen 9,7% tahun 2018 seluas 20.885 ha sedang tahun 2017 seluas 19.044 ha, dari segi produktivitas mengalami kenaikan sebesar 1,42 %, kenaikan produksi jagung disebabkan harga komoditas menguntungkan secara ekonomi.

3. Produksi Bawang Merah

Produksi Bawang merah tahun 2018 sebesar 303.702 ton, atau terealisasi sebesar 103,49 % dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2017 sebesar 285.488 ton, pencapaian tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,41 % (produksi padi tahun 2017 sebesar 293.676 ton). Kenaikan produksi tahun 2018 ditopang kenaikan luas panen sebesar 1,3% tahun 2018 sebesar 29.082 ha sedang tahun 2017 sebesar 28.710 ha, kenaikan

produktivitas sebesar 2% tahun 2018 sebesar 10,44 ton/ha sedang tahun 2017 sebesar 10,23 ton/ha.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan adalah

- Program peningkatan produksi pertanian melalui 11 kegiatan yaitu
 - J Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Distribusi bantuan alat pertanian baik hand traktor, traktor roda 4, Combine Harvester (alat panen padi/ sereal), Rice transplanter/alat mesin penanam padi, Power tresher (Perontok Serbaguna) Mesin perontok padi, pompa air, transplanter dan cultivator dari pusat untuk percepatan pengolahan lahan, penanaman pengolahan pascapanen dan penyediaan air irigasi
menyediakan dan menyiapkan bantuan pompa jika terjadi kekeringan melalui Brigade kekeringan lebih dari 30 unit di kantor Dinas
 - J Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Peningkatan produktivitas dengan penyediaan benih sumber padi yang unggul
 - J Peningkatan kesuburan tanah/reklamasi lahan
Peningkatan kesuburan tanah dan Pencerahan masyarakat brebes tentang pertanian yang sehat, aman dan lestai menuju brebes sadar organik dengan penggunaan pupuk organik buatan kelompok tani
 - J Pengendalian hama terpadu
Terkedalnya serangan organisme pengganggu tanaman hortikultura/bawang merah
 - J Peningkatan dan pengamanan produksi pangan
Mendorong petani untuk menanam padi dengan bantuan benih padi unggul dari APBD 2 telah disiapkan 7.000 kg untuk menangani 280 ha lahan yang terkena puso agar bisa ditanami kembali.
 - J Pemberdayaan lahan tidur/terlantar/kritis dalam rangka peningkatan produksi pangan
 - J Infrastruktur peningkatan produktivitas dan sarana prasarana pertanian
Meningkatnya luas tanam padi, jagung dan bawang merah (Meningkatnya indeks pertanaman (IP) dari 150 menjadi 300) dengan Terbangunnya irigasi di 5 lokasi/desa yang mengairi sawah 175 ha

Meningkatnya jalur mobilisasi hasil pertanian dengan Terbangunnya jalan usaha tani di 9 desa dengan panjang 3,5 km

- J Perlindungan Tanaman dan Pengamatan OPT
Adanya koordinasi dan gerakan bersama dalam pengendalian OPT/organisme pengganggu tanaman dan penyediaan pestisida untuk meminimalisasi terjadinya gagal panen akibat puso
- J Penunjang Program/Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Pusat
Meningkatnya luas tanam padi, jagung dan bawang merah (Mendingkatnya indeks pertanaman (IP) dari 150 menjadi 300) melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas lebih dari 1.000 ha
- J Infrastruktur peningkatan produktivitas dan sarana prasarana pertanian (Irigasi) (DAK)
Meningkatnya luas tanam padi, jagung dan bawang merah (Mendingkatnya indeks pertanaman (IP) dari 150 menjadi 300) dengan pembangun irigasi IATD seluas 350 ha, IAP 175 ha, dam parit 80 ha, tahun 2017 seluas 825 ha
- J Program Upsus Kementerian pertanian dalam rangka swasembada padi, jagung, kedelai dan bawang merah kerjasama dengan TNI
- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan 1 kegiatan
 - J Pengawasan peredaran pestisida dan pupuk
Pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dan perlindungan petani dari pestisida palsu
- Program peningkatan ketahanan pangan dengan 5 kegiatan yaitu
 - J Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan
Adanya Database potensi pertanian di Kabupaten Brebes yang Lengkap dan Akurat dari luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas
 - J Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Berkembangnya sistem budidaya padi jajar legowo dan Bantuan padi kelas BP 1.250 kg untuk 50 ha dan Bantuan kompos 22.500 kg untuk 50 ha
 - J Pengembangan pertanian pada lahan kering
Tambah tanam jagung dengan benih jagung hibrida seluas 35 ha pada lahan kering
 - J Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
pembinaan penangkar benih

- J Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Sekolah lapang pertanian bawang merah
- Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan 3 kegiatan
 - J Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya kinerja Penyuluh dan peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian baik budidaya dan teknologi
 - J Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian/ Perkebunan peningkatan kapasitas penyuluhan
 - J Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Tersedianya sarana penyuluhan berupa alat uji kadar gabah dan prasarana gedung.

Analisis Penghambat Keberhasilan adalah

- o Kondisi iklim tahun 2018 adalah kemarau panjang menyebabkan kurangnya persediaan air untuk budidaya padi. Sehingga terjadi Penurunan Luas Panen kondisi luas panen tahun 2018 sebesar 102.278 ha atau turun 2,62% dibanding tahun 2017 sebesar 105.025 ha
- o Kondisi daerah irigasi/DI Pemali Bawah yang mendapat air dari bendung Notog debit andalan dari sungai Pemali dan luas arealnya 26.831 Ha di 7 kecamatan yaitu Brebes, Jatibarang, Songgom, Larangan, Wansari, Ketanggungan dan Bulakamba dilakukan perbaikan dan rehabilitasi saluran oleh Kementerian PU dan Kondisi daerah irigasi/DI Layanan Waduk Malahayu seluas 12.486 ha yang meliputi :
 - DI Jengkelok 6.173 Ha
 - DI Kabuyutan 4.166 Ha
 - DI Babakan 2.147 Ha

sedang dilakukan pengerukan waduk oleh kementerian, dimana pada tahun 2018 sejak Agustus sampai dengan Desember awal dilakukan Penutupan total dan bulan Desember baru akan dilakukan pembukaan.

Akibat hal tersebut diatas maka capaian luas tambah tanam di 11 kecamatan bulan September mengalami gangguan yang akan di panen di bulan Desember.

- o Dampak perubahan iklim tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap produksi padi di Brebes dimana pada awal tahun 2018 terjadi banjir besar yang merendam sawah sehingga menyebabkan puso seluas 353 ha dengan potensi kehilangan

produksi sebesar 1.931 ton. Bencana banjir awal tahun/subround 1 Januari-April juga menyebabkan produktivitas padi turun 1,97 % (0,34 ton/ha) tahun 2018 sebesar 5,47 ton/ha dimana tahun 2017 5,581 ton/ha GKG /gabah kering giling dengan potensi kehilangan produksi sebesar 756 ha (0,34 ton/ha kali luas panen subround 1 yang terdampak banjir seluas 2.224 ha), Dampak kemarau panjang pada tahun 2018 menyebabkan puso seluas 137 ha dengan potensi kehilangan produksi sebesar 749 ton GKG (gabah kering giling).

Perbandingan Capaian Kinerja akhir Restra

Pencapaian target jangka menengah merupakan bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2017 dengan target lima tahunan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Akhir Renstra
Indikator Ketersediaan Cadangan Pangan

Jenis Tanaman	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a Padi	518.341	607.223	571.508	591.178	637.184	591.889	560.116
b Jagung	66.705	116.545	178.836	104.038	134.106	133.932	145.463
c Bawang Merah	259.000	304.757	375.974	311.296	338.496	293.676	303.772

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ton) selama 2 tahun telah berhasil dapat dilihat di awal renstra produksi padi tahun 2018 terjadi kenaikan untuk jagung dan bawang merah yang perlu menjadi perhatian adalah pada komoditas padi dimana terjadi penurunan.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya Perekonomian Rakyat

Hasil pengukuran pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Rakyat yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja rata – rata capaiannya 93,5% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil** dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Rakyat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Perekonomian Rakyat	Prosentase Pertumbuhan investasi	%	100	52.55	52.55
	Prosentase Koperasi sehat	%	6.84	6,48	94,74
	Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitasnya	%	4.44	5.70	128.38
Jumlah Rata-rata					91,89%

➤ **Prosentase Pertumbuhan Investasi**

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah.

Capaian dari Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan Investasi 52,55% dari target 100% terealisasi 52,55% yang dikategorikan berhasil. Hal ini disebabkan usaha mempromosikan daerah dalam menarik insvestor untuk menanamkan investasinya.

Salah satu upaya untuk menarik investor dan guna meningkatkan gairah usaha serta investasi di Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes menghapus persyaratan izin gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie), sebagai pra syarat usaha. Penghapusan HO ini diberlakukan mulai November 2017, sesuai Surat Edaran Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO). Dengan tidak adanya HO tersebut diharapkan masyarakat yang ingin membuka usaha di Brebes tidak terlalu repot dan investor yang ingin membuka usaha di kota bawang akan terus meningkat.

HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Dicabutnya HO semata-mata untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha. Ditiadakannya izin gangguan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 yang berisi Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di daerah. Tindaklanjutnya, dikeluarkanlah Surat Edaran Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO).

Adapun Program yang dilakukan :

1. Program Peningkatan Promisi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Peningkatan Pelayanan Umum;
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

➤ **Prosentase Koperasi Sehat**

Syarat untuk menjadi koperasi sehat adalah dengan melakukan RAT, harus ada partisipasi anggota maupun aktivitas koperasi yang bersangkutan. Partisipasi anggota koperasi dalam RAT harus tinggi karena anggota merupakan elemen yang menentukan keberhasilan koperasi karena anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dan sebagai anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, mengawasi, dan memegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Dalam RAT partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dapat dimaksimalkan.

Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Berpredikat Sehat, pencapaiannya sebesar 6,48 % atau hampir mencapai target yang diharapkan, yakni sebesar 6,84 %. Pencapaian yang belum sesuai target ini dikarenakan Perbandingan untuk mencapai target tersebut, yakni jumlah seluruh Koperasi, Realisasi pada akhir tahun 2018, mencapai 370 unit koperasi, jumlah ini melebihi target yang direncanakan pada tahun 2018, yaitu total jumlah seluruh koperasi diperkirakan sebesar 351. Pada tahun 2018, ada beberapa Lembaga Keuangan yang baru berbadan hukum koperasi, dengan adanya beberapa tambahan jumlah koperasi baru yang mayoritas memiliki Usaha Simpan Pinjam, maka koperasi baru ini belum melaksanakan RAT, sehingga predikat Koperasi baru ini masih belum dapat diketahui karena Kinerja Koperasi Baru ini masih dalam pantauan dan bimbingan Dinkopumdag Brebes.

Dari Jumlah 370 Koperasi tersebut, Jumlah Koperasi yang aktif sebanyak 296 Unit dan 24 Koperasi diantaranya merupakan Koperasi aktif dan Berpredikat sehat yang menjadi nominasi Koperasi berprestasi di Tahun 2018. Dengan realisasi pada tahun ini, diharapkan untuk tahun ke depan, pencapaian targetnya minimal sesuai dengan target yang telah diterapkan atau bahkan mampu melebihi target.

➤ **Prosentase UKM yang meningkat nilai Produktivitas**

Hasil dari capaian Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitas adalah Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya. Pencapaiannya sudah melampaui target, dari target sebesar 4,4 %, pada akhir tahun 2018, pencapaiannya sebesar 5,7 %. Perolehan ini didapat dari jumlah Usaha Mikro yang telah memiliki izin usaha dan sertifikasi produk yang dihasilkan. Pada akhir tahun 2018, jumlah Usaha Mikro yang telah memiliki izin usaha sebanyak 5.714 Unit Usaha. Dengan adanya izin usaha dan sertifikasi produk, maka Usaha Mikro dapat memasarkan produknya pada beberapa Toko Modern, atau Pasar Swalayan, sehingga usahanya dapat lebih berkembang. Dengan adanya pengembangan usaha ini, maka akan meningkatkan Omset Usaha Mikro.

Program yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Prosentase Koperasi Sehat dan Prosentase IKM meningkat produktivitasnya adalah :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UMKM dan Koperasi;

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Koperasi;
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Program Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar Rp. 537.067.197,- atau 97,24% dari total pagu sebesar Rp. 552.329.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,76% dari pagu yang ditentukan.

Sasaran Strategis 3.3
Meningkatnya Usaha Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Usaha Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran”, terdiri dari 2 Indikator Kinerja.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Usaha Pengetasan Kemiskinan dan Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Angka Kemiskinan	Angka	19.14	17,17	111.47	106,33
Menurunnya prosentase tingkat pengangguran terbuka	%	5,13	7,27	70.56	61.15
Jumlah					99,25%

➤ **Angka Kemiskinan**

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persentase tingkat kemiskinan absolutnya masih tinggi se-Jawa dalam beberapa tahun belakangan ini. Batas garis kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015

sebesar 309.314,- per kapita per bulan, sedangkan di Kabupaten Brebes batas garis kemiskinan lebih tinggi yaitu sebesar Rp.340.538,- per kapita per bulan. Akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian angka Kemiskinan sebesar 89.71% dan dikategorikan sangat baik. Selama tahun 2017 angka kemiskinan pada kisaran 19.14%. di tahun 2018 turun menjadi 17,17% pada akhir tahun 2018. Kondisi Kabupaten Brebes yang sangat besar dengan penduduk yang besar mencapai 1,8 juta lebih menjadi tantangan. Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya sekuat tenaga dengan menggandeng seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini dengan berbagai kegiatan. Berbagai *upaya/strategi telah dilakukan* dalam penanggulangan kemiskinan antara lain di bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya yaitu dengan cara antara lain pelatihan, pendidikan, ketrampilan, bantuan perbaikan ekonomi, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, menerbitkan Kartu Brebes Pintar dan Kartu Brebes Sehat, serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.

Program yang telah dilaksanakan untuk mengurangi Angka Kemiskinan adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan lainnya;
2. Program Pembinaan Anak Terlantar;
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4. Program Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Lainnya ;
5. Program Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS.

➤ **Menurunnya Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka**

Berdasarkan hasil capaian Prosentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 70.56% yang dikategorikan cukup baik, dari target 5,13% dan realisasi 7,27%. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang dinilai berperan penting dalam pengurangan angka pengangguran yaitu meningkatnya sektor usaha kreatif yang dalam hal ini menyangkut Usaha Kecil Menengah (UKM), adanya investor yang mau menanamkan

investasinya sehingga dapat menyerap tenaga kerja, serta peran serta sektor pendidikan yang dinilai mampu menciptakan tenaga kerja dengan keahlian.

Oleh karena itu pemerintah terus *berupaya untuk* mendorong berbagai sektor kreatif tersebut untuk dapat terus berkembang. Sehingga diharapkan selain mampu menyerap pengangguran, usaha kreatif maupun berbagai usaha lainnya tersebut akan mendatangkan investasi yang juga membantu peningkatan perekonomian.

Dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran yang rata – rata capaiannya sebesar 70,56% dapat dikategorikan **cukup berhasil**. Pengurangan pengangguran menjadi upaya strategis dalam menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes antara lain :

1. Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan bursa kerja (job fair).
2. Bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk meningkatkan ketrampilan para pencari kerja agar dapat diterima di pasar kerja.
3. Memberikan fasilitasi/kemudahan bagi kepada para pencari kerja (khususnya yang akan bekerja ke luar negeri), melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
4. Berupaya memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan, dan berbasis masyarakat bagi para pencari kerja, baik melalui anggaran dari kementerian, pemerintah propinsi maupun dari anggaran pemerintah daerah.
5. Membuat Aplikasi Ketenagakerjaan Online untuk mempermudah pembuatan kartu pencari kerja dan mengoptimalkan data data penempatan tenaga kerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar Rp. 505.917.800,- atau 76,16% dari total pagu sebesar Rp. 664.295.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 13,84% dari pagu yang ditentukan.

Program yang menunjang keberhasilan, diantaranya :

- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Sasaran Strategis 3.4
Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pada sasaran strategis “Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, terdiri dari 2 Indikator Kinerja.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Penurunan Tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Prosentase PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial	%	31.94	27.00	84.53	-
Prosentase PMKS yang tertangani memiliki kemandirian ekonomi	%	68.00	66.00	97.00	-
Jumlah				90,77%	

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Capaian indikator pada Sasaran Setrategis Prosentase PMKS Mampu Menjalankan Fungsi Sosialnya pada tahun 2018 adalah sebesar 84,53% dikategorikan memperoleh capaian berhasil. Sedangkan untuk Sasaran Strategis Prosentase PMKS Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya capaian kinerjanya pada tahun 2018 adalah sebesar 97% dikategorikan sangat berhasil.

Penggunaan atas sumber daya keuangan untuk mencapai target-target pada sasaran 1 adalah sebesar Rp. 1.892.229.200 atau sebesar 89% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.106.835.000.

MISI IV : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Kinerja yang perlu didorong upaya pencapaian pada tahun 2018 adalah kondisi berbagai infrastruktur.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Terdapat 2 sasaran strategis dan 8 Indikator Kinerja didalam misi ini dan capaian kerjanya tercakup di dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
sesuai Tata Ruang dan Memperhatikan Kelestarian
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik) Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	60.00	68.11	113.52
) Cakupan akses air minum layak	%	90.00	85.33	94.81
) Cakupan akses jamban	%	70.00	78.36	111.94
) Prosentase kawasan bebas banjir perkotaan	%	92.00	90.00	97.82
Meningkatnya mutu hunian masyarakat dan lingkungan hidup	Prosentase Rumah Layak Huni	%	89.77	90.00	100.26
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :				
	- pencemaran air	%	100	100	100
	- pencemaran udara	%	100	100	100
	- tutupan lahan (lahan kritis)	%	10	10	100
Rata-rata					102.29%

Hasil dari capaian kinerja pada misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Tata Ruang dan Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mencapai rata – rata 102.29% yang dikategorikan **sangat berhasil**.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka mendukung semua aktifitas sosial, ekonomi, budaya maupun politik serta pengembangan wilayah. Sinergi menjadi kata kunci pembangunan ekonomi nasional saat ini. Tidak terkecuali di bidang infrastruktur dan transportasi. Sistem transportasi yang efektif dan efisien harus ditunjang oleh infrastruktur transportasi yang baik, saling terkoneksi dan yang saling menunjang satu sama lain. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor sesuai dengan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis wilayah dan daya dukung lingkungan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing ekonomi daerah.

Sasaran Strategis 4.1
Meningkatnya Infrastruktur Jalan, air bersih dan sanitasi yang baik

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Infrastruktur Jalan, air bersih dan sanitasi yang baik terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Infrastruktur Jalan, air bersih dan sanitasi yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik) Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	60.00	68.11	113.52	100.50%
) Cakupan akses air minum layak	%	90.00	85.33	94.81	115.48%
) Cakupan akses jamban	%	70.00	78.36	111.94	
) Prosentase kawasan bebas banjir perkotaan	%	92.00	90.00	97.82	100.00%
Rata-rata					104.52%	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian untuk sasaran strategis "Meningkatnya infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi yang baik" adalah sangat berhasil yakni 104.52%.

Capaian Persentase Jalan Kabupaten kondisi baik tahun 2018 adalah 68,11% atau 483,75 km dari total panjang jalan 710,19 km, memiliki capaian sangat berhasil, bahkan telah melampaui target sebesar 60,00%. Sedangkan untuk *Persentase cakupan akses Air Bersih* adalah 85,33% angka ini belum mencapai target yang ditentukan di tahun 2018 yaitu 90%. Angka capaian ini turun dibandingkan dengan tahun lalu tetapi karena sesungguhnya ada koreksi data di mana selama ini masyarakat yang sudah menggunakan sumur gali kemudian juga ikut pasang PDAM dihitung ganda. Pemkab Brebes melakukan pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk mewujudkan semua masyarakat mendapat akses air bersih telah banyak membangun sarana dan prasarana air bersih baik dengan melalui perpipaan maupun non perpipaan. Jaringan air bersih perpipaan perkotaan bekerja sama dengan PDAM Brebes sedangkan perpipaan perdesaan melalui program APBD, DAK dan PAMSIMAS dari dana Pemerintah Pusat yang juga ditambah dari penyediaan air bersih oleh pemerintah Desa.

persentase kawasan bebas genangan dari air hujan belum mencapai target. Jumlah titik/kawasan rawan genangan di Kabupaten Brebes ada 84 titik, yang mana sebagian besar ada di Brebes tengah dan utara. Dari 84 titik rawan tersebut 75 titik bebas genangan air hujan sedangkan 9 titik rawan mengalami genangan, tetapi dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 sebagian besar kawasan kota brebes dilanda banjir tetapi oleh sebab jebolnya tanggul kali pemali. Dari keadaan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu wilayah Kab. Brebes 100% bebas genangan. Kabupaten Brebes disamping membangun saluran drainase baru juga pemeliharaan saluran drainase yang mengalami kerusakan serta menguras saluran yang mengalami pendangkalan tetapi karena banyak kondisi drainase perkotaan yang sudah tidak memadai sehingga harus dinormalisasi tetapi kendala yang dihadapi adalah banyak saluran drainase yang sudah tertutup oleh bangunan warga, hal ini menyebabkan drainase tersumbat ketika musim hujan.

Sasaran Strategis 4.2
Meningkatnya Mutu Hunian Masyarakat dan
Lingkungan Hidup

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Mutu Hunian Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Prosentase Rumah Layak Huni	%	89.77	90.00	100.26	99.41
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :					
- Pencemaran air	%	100	100	100	100
- Pencemaran udara	%	100	100	100	100
- Tutupan lahan	%	10	10	100	100
Rata - rata				100,07%	-

Hasil rata – rata dari capaian sasaran strategis diatas adalah 100,07% yang dikategorikan **sangat berhasil**.

➤ **Prosentase Rumah Layak Huni**

Pemenuhan kebutuhan perumahan di Kabupaten Brebes cukup baik. Pada pertengahan tahun 2018 Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana DAK untuk Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disebut dengan Perumahan seribu pintu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada warga miskin yang tersebar di Kabupaten Brebes. Program sosial ini sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak atau mencapai kurang lebih 1,8 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan pada akhir 2017 sekitar 19,14 persen. Dengan adanya program RTLH untuk warga miskin, diharapkan kemiskinan di Brebes dapat teratasi.

Adapun Program Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan pada indikator ini adalah :

- Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Perumahan Formal dan Swadaya
- Kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar Rp. 3.054.251.790,- atau 91,64% dari total pagu sebesar Rp. 3.333.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,36% dari pagu yang ditentukan.

➤ **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

- J Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- J Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Hutan/ Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam semangatnya merupakan capaian atas upaya pengarusutamaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018, yaitu sebesar 100,00%.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program Perlindungan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Pemantauan kualitas lingkungan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang asri Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Kantor Lingkungan Hidup mengadakan Lomba Adipura Tingkat RW se-Kabupaten Brebes. Disamping itu dalam pengelolaan sampah Kabupaten Brebes menjadi percontohan di Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah menjadi biogas dan kompos yang dapat diproduksi dalam sehari mencapai 10 ton.



Gambar 3.3
Pengolahan Sampah Terpadu TPST Gandasuli - Brebes

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar Rp. 7.697.130.133,- atau 91,23% dari total pagu sebesar Rp. 8.437.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,77% dari pagu yang ditentukan.

MISI V : MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN DAN MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pada Misi Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta pemenuhan Hak anak dalam pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial ini terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja.

*Tabel 3.23
Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak Dalam Pembangunan dan Mewujudkan Perlindungan Sosial*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90	85,86	95,40%
	Prosentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	3.00	3.00	100%
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana layak anak dan perlindungan anak	Jumlah kelurahan / desa layak anak	Desa/Kel.	16	11	68.75%
	Prosentase penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan diskriminasi	%	100	100	100%
Rata - rata					91,04 %

Hasil pencapaian dari pengukuran kinerja diatas prosentase rata – rata capaiannya 91,04% yang dikategorikan **berhasil**.

Sasaran Strategis 5.1
Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90	85,86	95,40%	93.21%
Prosentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100%	100%
Rata - rata				97,70%	-

Rata – rata dari hasil pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender mencapai 97,70%.

➤ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Penghitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan.

Hasil dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 95,40% yang dapat dikategorikan **sangat berhasil**, meskipun belum tercapai sepenuhnya. *Faktor yang* mempengaruhi tercapainya IPG yaitu masyarakat sudah mulai memahami pengetahuan tentang kesetaraan gender, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pencapaiannya 94,97%, partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif mencapai 94,44% serta partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 100%.

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, maka kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan, serta partisipasi kerja harus mendapatkan perhatian. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan antara lain terlaksananya fasilitasi rakor perlindungan, kegiatan penyuluhan KKG dan kewirausahaan pada masyarakat, serta pelatihan ketrampilan usaha melalui kegiatan olah pangan dan kegiatan ketrampilan yang lain pada kelompok masyarakat.

➤ **Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Penurunan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Brebes telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dibuktikan dengan terselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. termasuk kekerasan fisik, mental dan penelantaran Rumah Tangga dan kekerasan seksual.

Sasaran Strategis 5.2
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Layak Anak dan Perlindungan Anak

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja yaitu : Jumlah Kelurahan /desa layak anak dan Prosentase penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan deskriminasi

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Layak Anak dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Jumlah Kelurahan /Desa layak anak	angka	16	11	68.75%	100%
Prosentase Penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan diskriminasi	%	100	100	100%	100%
Rata - rata				84.38%	100%

Berdasarkan hasil capaian pada tabel diatas rata – ratanya adalah adalah 84.38% yang dikategorikan **Berhasil**.

➤ **Jumlah Kelurahan/desa layak anak**

Sumber Daya Anak merupakan embrio dan cikal bakal terbentuknya sumberdaya manusia yang handal, tangguh, cerdas dan berkualitas. Kualitas Sumber daya Manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untu tumbuh, berkembang serta terlindungi. Untuk mempermudah pelaksanaan perlindungan anak, Pemerintah menciptakan dasar hukum tentang Desa Layak Anak melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Juknis Kabupaten. Kota Layak Anak di Desa/Kota yang dilaksanakan dengan berbasis desa. Dengan acuan tersebut diharapkan setiap daerah mampu melindungi hak anak –anak daerah agar hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak. Hasil capaian dari Indikator Jumlah Kelurahan /desa layak 68.75% dari target 16 desa/kelurahan dengan realiasi 11 desa/kelurahan yang dikategorikan tidak berhasil.

Dalam menidaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 ini Pemerintah Kabupaten Brebes menyusun Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Upaya yang telah dilaksanakan adalah pemenuhan hak perlindungan anak yang mengacu pada indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak, yaitu :

1. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 2. Kesehatan Dasar;
 3. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pembuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) masih terus dilakukan terus menerus yang dimulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

➤ **Prosentase Penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan diskriminasi**

Hasil pengukuran capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target 100 % dan realiasasi 100%. Dalam penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan diskriminasi ini, DP3KB menggandeng kepolisian dan psikolog untuk pendampingan korban kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) "TIARA". Lembaga ini hadir untuk melayani masyarakat, baik pada aspek pencegahan, penyuluhan, maupun pada upaya perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga ini berada di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) yang beralamat di Jl. Taman Siswa Brebes.

Layanan PPT Tiara adalah bimbingan, konseling, pendampingan korban, layanan kesehatan dan psikologis dan layanan bantuan hukum, serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial. Pelaporan dan pelayanan di PPT Tiara Gratis, karena setiap layanan yang ada telah difasilitasi oleh Anggaran APBD II



*Gambar 3.4
PPT "TIARA" Kabupaten Brebes*

Masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Selain itu, juga masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pada misi ini mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Brebes dilakukan secara adil baik bagi laki – laki maupun perempuan sehingga memiliki akses, peran, kontrol dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Brebes juga dilakukan untuk pemenuhan hak – hak anak melalui pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan peningkatan jaminan perlindungan sosial.

Misi ini juga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan bersama. Kementerian/lembaga, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota harus bersama-sama memberikan perhatiannya terhadap isu ini. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua *stakeholder* diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi menjadikan perempuan dan anak berada pada garis aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas. Sehingga diharapkan bisa menurunkan kekerasan perempuan dan anak, *trafficking*, dan memastikan perempuan memiliki akses sumber daya ekonomi.

MISI VI Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Brebes mengedepankan partisipasi, transparansi, resposibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel dan penegakan supremasi hukum, sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Pada Misi ini terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja.

Sasaran Strategis 6.1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional, sehingga semua level pemerintah terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik serta mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Th. 2018	% Capaian Th. 2017
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan publik & tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WTP (4)	WDP (3)	75%	75%
	Nilai SAKIP	Kategori	57,65 CC	60,67 B	100%	100%
	Nilai LPPD	Kategori	3,000 Sangat Tinggi	3,126 Sangat Tinggi	100%	100%
	Nilai IKM	Nilai	78	78,48	100,59%	76,14
Rata rata					93,90%	

Rata – rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih mencapai 93,90% yang dikategorikan **Berhasil**.

➤ **Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah**

Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah merupakan salahsatu indikator pada Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Penilaian Keuangan ini dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan komponen penting untuk menilai sejauhmana penilaian yang obyektif terhadap akuntabilitas dan kinerja daerah dari aspek pengelolaan keuangannya.

Dari hasil pengukuran capaian pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan (belum berhasil). Target yang ditetapkan dalam mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi realisasinya masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 opini BPK terhadap laporan BPK masih WDP.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya opini WTP antara lain :

1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), Kelemahan dalam pengelolaan aset yang meliputi : Informasi aset tetap tidak dilaporkan sesuai standar yang telah ditetapkan; aset tetap tidak didukung data/catatan; belum dilakukan inventarisasi; penatausahaan aset tetap tidak memadai, aset tetap tidak diketahui keberadaannya; lemahnya pengamanan aset yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik. Hal ini disebabkan karena SDM yang menangani aset kurang berkompeten dan tidak secara sungguh – sungguh menerapkan peraturan pemerintah dan Peraturan Mendagri tentang pengelolaan barang milik daerah serta kurang disiplin aparatur dalam mengelola asset daerah, sehingga nilai laporan aset tidak menggambarkan nilai asset yang dimiliki Pemerintah daerah yang sesungguhnya.
2. Ketidapatuhan pengelola keuangan yang seharusnya melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Ketidapatuhan tentunya menimbulkan berbagai persoalan seperti timbulnya kerugian keuangan Negara/daerah, penyimpangan administrasi, tidak efisien dan efektif.
3. Tidak melakukan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai WTP, adalah :

1. Semua tindak lanjut Hasil Pemeriksaan termasuk tahun-tahun sebelumnya yang telah direkomendasikan oleh BPK segera dilaksanakan dan diselesaikan.
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang kuat. Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

3. Meningkatkan profesionalitas SDM pengelola keuangan daerah khususnya penatausahaan keuangan daerah dan SDM pengelola asset disemua OPD antara lain melalui bintek dan pendampingan.

➤ **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemkab Brebes. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.27
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Kabupaten Brebes Tahun 2018

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
Perencanaan Kinerja	30	15,76	16,82	19,71	19,74
Pengukuran Kinerja	25	10,67	10,35	14,83	14,91
Pelaporan Kinerja	15	9,74	8,79	8,89	10,16
Evaluasi Kinerja	10	4,20	3,32	4,96	5,78
Capaian Kinerja	20	10,16	10,99	9,26	10,14
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,53	50,27	57,65	60,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B

Dari tabel pengukuran capaian diatas disimpulkan bahwa Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Brebes dilihat dari Nilai Hasil Evaluasinya terus meningkat.

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 terhadap capaian kinerja, Kabupaten Brebes memperoleh nilai SAKIP 60,73 (B). hal tersebut menunjukkan bahwa capaiannya melampaui target 60,00 (B) sangat berhasil.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan poin nilai ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun – tahun sebelumnya, terus dilakukan perbaikan dalam SAKIP Kabupaten Brebes antara lain merevisi perencanaan yang berorientasi pada hasil. Walaupun rata – rata realisasi sudah mencapai target akhir RPJMD, akan tetapi masih banyak yang harus terus dilakukan perbaikan dan dibenahi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan para pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja, sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran;
2. Meningkatkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan review kinerja secara berkala;
3. Melakukan penyempurnaan pada RPJMD dan Renstra OPD dengan memperbaiki indikator kinerja yang berorientasi hasil, relevan dan cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis;
4. Meningkatkan kualitas IKU seluruh OPD agar memenuhi kriteria SMART dan selaras dengan IKU Pemerintah Kabupaten dan memanfaatkan IKU tersebut dalam dokumen penganggaran;
5. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja sehingga dapat menciptakan *performanced based budgeting*;
6. Memastikan dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja level Pemerintah Daerah dan OPD tahun berjalan telah diunggah di *website* sebagai wujud transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada publik;
7. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di OPD, sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
8. Melakukan review atas program, kegiatan dan komponen anggaran, untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis.



Gambar 3.5
Pendampingan Penyusunan SAKIP di KEMENPANRB

➤ **Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Gambaran kinerja tahunan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/10174/Otda tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual Penyusunan LPPD Tahun 2016 dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Brebes serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Tabel 3.28
Daftar Skor, Prestasi dan Peringkat Antar Kabupaten dan Kota
Se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	KABUPATEN KARANGANYAR	3.5521	ST
2	KABUPATEN KUDUS	3.4969	ST
3	KABUPATEN PATI	3.4766	ST
4	KOTA SEMARANG	3.4142	ST
5	KABUPATEN SEMARANG	3.3740	ST
6	KABUPATEN JEPARA	3.3507	ST
7	KABUPATEN SRAGEN	3.3252	ST
8	KOTA MAGELANG	3.3080	ST
9	KABUPATEN SUKOHARJO	3.3039	ST
10	KABUPATEN PURBALINGGA	3.2954	ST
11	KABUPATEN DEMAK	3.2867	ST
12	KABUPATEN TEMANGGUNG	3.2828	ST
13	KABUPATEN PEKALONGAN	3.2771	ST
14	KOTA SURAKARTA	3.2770	ST
15	KABUPATEN BLORA	3.2678	ST
16	KABUPATEN BOYOLALI	3.2560	ST
17	KABUPATEN GROBOGAN	3.2543	ST
18	KABUPATEN KENDAL	3.2226	ST
19	KABUPATEN BANJARNEGARA	3.2171	ST
20	KABUPATEN PURWOREJO	3.2167	ST
21	KABUPATEN KLATEN	3.2138	ST
22	KABUPATEN BANYUMAS	3.2101	ST
23	KABUPATEN WONOGIRI	3.1894	ST
24	KOTA PEKALONGAN	3.1587	ST
25	KABUPATEN MAGELANG	3.1375	ST

No	Nama Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
26	KABUPATEN WONOSOBO	3.1353	ST
27	KOTA SALATIGA	3.1289	ST
28	KABUPATEN KEBUMEN	3.1274	ST
29	KABUPATEN BREBES	3.1264	ST
30	KABUPATEN CILACAP	3.1082	ST
31	KABUPATEN REMBANG	3.1013	ST
32	KABUPATEN PEMALANG	3.0827	ST
33	KABUPATEN TEGAL	3.0771	ST
34	KABUPATEN BATANG	3.0471	ST
35	KOTA TEGAL	3.0358	ST

Berdasarkan hasil skor diatas bahwa nilai LPPD tahun 2018 mencapai rangking 29 dengan skor 3,1264 prestasi ST (Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan nilai/skor tahun 2018 meningkat 0,1317 point dibandingkan dengan tahun 2017 skor 2,9947. Dengan kategori capaian **sangat berhasil**.

➤ Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Hasil dari pengukuran capaian kinerja pada indikator Nilai IKM realisasi 78,46 dari target 78 sehingga prosentase capaian 100,57% yang dikategorikan sangat berhasil dan telah melampaui mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, nilai IKM terealisasi 74,17 sehingga nilai IKM pada tahun ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SDM dan Kinerja aparatur penyelenggara pelayanan publik yang semakin baik, tahapan pelayanan (SOP) semakin tertata dan dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM antara lain :

1. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik ;
2. Memudahkan prosedur tahapan pelayanan ;
3. Menetapkan kewajiban/kepastian biaya pelayanan;
4. Membuat kenyamanan kondisi lingkungan pelayanan.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017 menunjukkan kenaikan. Berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2018, secara umum pendapatan daerah dapat tercapai sebesar Rp 2.854.028.069.566,31 dari target sebesar Rp 2.889.816.641.000,00 atau mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 35,788,571,433.69 atau 1,24%. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2012 – 2018 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.29
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2012 - 2018

TAHUN	PENDAPATAN		(%) REALISASI
	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4
2012	1.570.670.462.000,00	1.567.078.034.277,00	99,77
2013	1.758.507.520.000,00	1.781.873.278.077,00	101,33
2014	1.957.064.095.000,00	2.045.064.030.908,00	104,50
2015	2.432.876.271.000,00	2.417.208.946.548,00	99,37
2016	2.785.284.383.000,00	2.572.334.594.631,00	92,35
2017	2.875.777.806.000,00	2.824.292.206.279,58	98,21
2018	2.889.816.641.000,00	2.854.028.069.566,31	98,76

Sumber : BPPKAD Kabupaten Brebes

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah secara umum adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dibanding dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini berakibat pada kondisi daerah dengan ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 adalah:

- a. Melakukan pendataan dan putahiran data sumber-sumber PAD.
- b. Melakukan penetapan target pendapatan yang sesuai dengan potensinya.
- c. Mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem administrasi pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul secara optimal dan tidak terjadi kebocoran.
- e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.
- f. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan.
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
- i. Meningkatkan pola koordinasi internal dan pola koordinasi eksternal dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- j. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.
- k. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk anggaran Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 3.039.225.442.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.825.235.750.927,00 atau sebesar 92,96% dengan rincian Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 95,16% dan Belanja Langsung hanya terealisasi sebesar 90,16%.

Target dan Realisasi Belanja Daerah pada APBD TA 2018 adalah berikut:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Belanja Daerah
APBD Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	BELANJA DAERAH	3,039,225,442,000.00	2,825,235,750,927.00	92.96
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,701,651,198,000.00	1,619,226,909,774.00	95.16
2.1.1	Belanja Pegawai	1,081,968,399,000.00	1,012,026,076,851.00	93.54
2.1.4	Belanja Hibah	45,229,000,000.00	42,729,060,000.00	94.47
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22,134,350,000.00	19,791,200,000.00	89.41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa	12,859,244,000.00	10,339,493,766.00	80.41
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	534,460,205,000.00	533,428,181,625.00	99.81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	912,897,532.00	18.26
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,337,574,244,000.00	1,206,008,841,153.00	90.16
2.2.1	Belanja Pegawai	63,759,304,000.00	59,447,427,655.00	93.24
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705,249,760,000.00	619,455,375,433.00	87.83
2.2.3	Belanja Modal	568,565,180,000.00	527,106,038,065.00	92.71

Sumber : BPKAD Kab.Brebes (un-audit)

Secara umum pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2018 sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dari realisasi anggaran, pada tahun 2018 belanja dapat direalisasikan sebesar 92,96%. Belum optimalnya realisasi tersebut karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2018 karena proses pelaksanaannya dengan pola multiyears. Dipengaruhi pula adanya efisiensi belanja.

Memperhatikan hal tersebut, maka solusi/ pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah perencanaan program dan kegiatan yang lebih akurat, dan peningkatan kesiapan OPD dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan setelah APBD ditetapkan.

Untuk mengetahui realisasi perhitungan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2018, secara ringkas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN DAERAH	2,889,816,641,000.00	2,854,028,069,566.31	98.76
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	356,931,221,000.00	346,908,102,966.31	97.19
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	88,242,000,000.00	95,717,065,038.00	108.47
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,389,865,000.00	13,659,209,454.00	94.92
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,352,689,000.00	5,127,056,689.00	69.73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246,946,667,000.00	232,404,771,785.31	94.11
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,764,468,808,000.00	1,753,057,931,104.00	99.35
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36,574,153,000.00	32,660,114,961.00	89.30
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,322,465,038,000.00	1,321,798,057,000.00	99.95
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	405,429,617,000.00	398,599,759,143.00	98.32
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	768,416,612,000.00	754,062,035,496.00	98.13
1.3.1	Pendapatan Hibah	168,285,880,000.00	168,436,680,000.00	100.09
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	194,718,846,000.00	183,007,975,496.00	93.99
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	61,214,390,000.00	58,419,884,000.00	95.43
1.3.7	Dana Desa	344,197,496,000.00	344,197,496,000.00	100.00
2	BELANJA DAERAH	3,039,225,442,000.00	2,825,235,750,927.00	92.96
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,701,651,198,000.00	1,619,226,909,774.00	95.16
2.1.1	Belanja Pegawai	1,081,968,399,000.00	1,012,026,076,851.00	93.54
2.1.4	Belanja Hibah	45,229,000,000.00	42,729,060,000.00	94.47
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22,134,350,000.00	19,791,200,000.00	89.41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa	12,859,244,000.00	10,339,493,766.00	80.41
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	534,460,205,000.00	533,428,181,625.00	99.81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	912,897,532.00	18.26
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,337,574,244,000.00	1,206,008,841,153.00	90.16
2.2.1	Belanja Pegawai	63,759,304,000.00	59,447,427,655.00	93.24
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705,249,760,000.00	619,455,375,433.00	87.83
2.2.3	Belanja Modal	568,565,180,000.00	527,106,038,065.00	92.71
SURPLUS / DEFISIT (PENDAPATAN - BELANJA)		(149,408,801,000.00)	28,792,318,639.31	

Sumber : Dinas PPKAD (un-Audit)

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Brebes tahun 2018 menjadi bernilai strategis karena merupakan tahun transisi pencapaian target dari sasara strategis lima tahunan sebagai bahan evaluasi pencapaian target RPJMD 2012-2017 dan dimulainya RPJMD 2017-2022 dalam pembangunan periode lima tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada semua sasaran pembangunan daerah, dengan cara membandingkan capaian setiap indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditentukan, menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Sangat Baik/Berhasil**, dengan rata-rata 122,44. Apabila dirinci atas capaian kinerja pada 12 sasaran strategis dan 36 indikator pembangunan yang ada, capaian kinerja berkategori sangat berhasil sebanyak 25 indikator, berkategori berhasil sebanyak 6 indikator, berkategori cukup berhasil sebanyak 2 indikator, dan hanya terdapat 3 capaian kinerja yang berkategori sangat kurang berhasil.

Hasil capaian kinerja ini tentulah tidak terlepas dari komitmen kepala Perangkat Daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam IKU dan Renstra.

Adanya capaian kinerja sasaran yang belum mencapai 100 serta terdapatnya capaian kinerja dengan kategori cukup dan kurang pada tahun 2018 ini, menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sasaran secara optimal. Beberapa permasalahan yang telah ditemukan dalam usaha pencapaian target serta solusi pemecahan yang telah dirumuskan, perlu disadari oleh pelaksana kegiatan serta semua stakeholder untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan, antara lain :

- (1) Perlu adanya system monitoring, evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik;

